



**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG
TAHUN 2021**

**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG
2020**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2021 dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Rencana Kerja (Renja) ini menampilkan nomenklatur/kodefikasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang berpedoman kepada Permendagri 90 Tahun 2019 dan disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan Sistematika Penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja Perangkat Daerah dengan mengacu kepada Renstra Perangkat Daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2021 ini disusun dalam rangka menentukan rencana kebijakan, program dan kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) ini, mudah-mudahan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun 2021 pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Kami berharap penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2021 ini dapat berguna bagi peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bandung, Juni 2020

**KEPALA
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG**



Ir. H. ARIF PRASETYA S, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600825 199011 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung	16
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung	18
2.4 Review Terhadap RKPD	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31

BAB III	TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLAAN	35
	PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG 2021	
3.1	Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2021	35
3.2	Target Pajak Daerah Tahun 2021	38
BAB IV	RANWAL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN	39
	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2021	
4.1	Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2021	39
4.2	Pendanaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	47
BAB V	PENUTUP	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2019 pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung	12
Tabel 2.2	Capaian Indikator Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung	17
Tabel 2.4	Reviu Terhadap RKPD Tahun 2019 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung	21
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung	31
Tabel 3.1	Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung	37
Tabel 3.2	Proyeksi Target Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021	38
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2021	41
Tabel 4.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD pada RKPD Pemerintah Kota Bandung Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022	49

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung 2018-2023 dengan mempertimbangkan pokok-pokok arahan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Bandung Periode 2018-2023. Dalam perjalanannya Renja BPPD 2021 dihadapkan adanya kebijakan Pemerintah Pusat, bahwa perencanaan penganggaran 2021 harus berpedoman kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, dimana arah kebijakan Permendagri 90 2021 "INDONESIA MENUJU SATU DATA SATU SISTEM"

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2021 memuat rancangan program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra BPPD Periode 2018-2023 serta pendanaannya mempertimbangkan kerangka kebijakan pendanaan dan pagu indikatif dalam RKPD Tahun 2021. Berdasarkan acuan tersebut, maka Rencana Kerja dan pendanaan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung merupakan wujud dari sebuah perencanaan sehingga menciptakan sebuah komitmen yang harus dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Tantangan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah eksistensi dalam meningkatkan pendapatan

untuk kebutuhan pendanaan pembangunan daerah untuk pencapaian target-target pembangunan daerah, sehingga diperlukan adanya penajaman penanganan pada institusi pendapatan yang menyangkut peningkatan pelayanan, kualifikasi SDM, standarisasi sarana kerja, penguatan tata laksana dan akuntabilitas manajemen pendapatan dalam mengoptimalkan kinerjanya. Serta mulai mempertajam pemanfaatan teknologi informasi, yang makin erat dengan tata kelola penerimaan dan pencatatan pendapatan daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan serta musyawarah perencanaan pembangunan daerah pasal 78, menyatakan bahwa penyusunan RKPD didasarkan pada rancangan Renja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung mengacu dan berpedoman pada landasan hukum sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- 11) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- 14) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan RPJM Daerah dengan RPJM Nasional 2010-2014;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);

- 18) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
- 19) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07 jo. Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 05);
- 20) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
- 21) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 22) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2013 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18,).
- 23) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- 24) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.

- 25) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 534 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung;
- 26) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 609 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pemungutan Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung;
- 27) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1405 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah:

- 1) Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis dalam lima tahun (Renstra) dan Rencana Kerja setiap satu tahun sekali (Renja).
- 2) Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kota Bandung

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2021 disusun sesuai dengan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Memuat Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan peraturan lainnya yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, serta susunan garis besar isi.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun lalu
- Menjelaskan pencapaian target Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun sebelumnya
- Melakukan review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

- Berisi kajian terhadap capaian kinerja Badan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Badan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

2.4 Review terhadap RKPD

Berisikan uraian mengenai perbandingan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, telaahan terhadap RKPD

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Menjelaskan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Menjelaskan hasil rumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

3.2 Program dan Kegiatan

Menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD

BAB IV : PENUTUP

Berisi catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun apabila anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi Badan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1405 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Kota Bandung sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Bandung di bidang Pendapatan Daerah. Sedangkan Tugas Pokok Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pengelolaan pajak, retribusi dan pendapatan daerah.

Tahun 2019 Program kegiatan yang terdapat pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung meliputi 8 (delapan) program yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
5. Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah;
6. Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah;
7. Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah

8. Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan PAD non Pajak Daerah.

Realisasi program kegiatan di tahun 2019 akan dianalisis sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

NO	LURUANG/BIKANG ULUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/OUTPUT/ KECIATAN (OULTU)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 5/0 TAHUN 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN NILAIANAN KEGIATAN TAHUN 5/0 TAHUN 2019 (%)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PRODIKAM DAN KEGIATAN 2020			TARGET PROGRAM DAN NEGSIAN (RENJA BPPD 2021	REALISASI TARGET PERIODE RENSTRA BPPD TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
						TARGET RENJA BPPD TAHUN 2020	REALISASI RENJA BPPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9-17	10	11	12-11/4
1	Program Terencana dan Pengembangan Pendidikan Pajak Daerah	Jumlah pendapatan Pajak Daerah	2.593.095.626.534	2.154.040.077.269	84,30	2.593.582.659.693	996.554.341.527	36,42	-	-	-
1	Kegiatan Pengurangan Penghasilan Dasar dan Potensi Pajak Daerah	Jumlah laporan potensi Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100	1 Laporan	-	-	-	-	-
2	Intensifikasi dan Eksistensi Pajak Reklamasi dan PAT	Jumlah dokumen kajian pajak Reklamasi/ Pajak Air Tanah	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100	-	-	-
3	Eksistensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Jumlah dokumen kajian Pajak Bumi dan Bangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen 1 Aplikasi	1 Aplikasi	33,33	-	-	-
4	Intensifikasi dan Eksistensi Pajak BPHTB dan PPT	Jumlah Laporan Intensifikasi dan Eksistensi Pajak BPHTB dan PPT	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	2 Laporan	50,00	-	-	-
5	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah	Jumlah Raperwal/ Baperwal/ Baperda	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-
6	Kegiatan Intensifikasi dan Eksistensi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir	Jumlah laporan intensifikasi dan eksistensi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Dokumen	2 Dokumen	50,00	-	-	-
7	Kegiatan Intensifikasi dan Eksistensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran	Jumlah laporan intensifikasi dan eksistensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Dokumen	2 Dokumen	50,00	-	-	-
11	Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah	Jumlah pendapatan pajak daerah	79 %	81,27 %	100,49	80 %	-	-	-	-	-
8	Penyusunan Tertib	Jumlah Penyusunan dan	21 Tayang/spot	26 Tayang/spot	98,53	2636 MMRK surat	240 MMRK	2,27	-	-	-

	Administrasi Pajak Daerah	Pengumpulan Informasi Pajak Daerah melalui Sistemasi Temp Mula	Surat Kabar, 6 tayang/spot Radio, 6 Tayang/spot Televisi, 9 kali sosialisasi utmp muka, dan 24 paket website *	Surat Kabar, 6 utang/spot Radio, 8 Tayang/spot Televisi, 30 paket website dan 7 kali sosialisasi utmp muka															
9	Pertukuan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan Pengalihan dan Penawaran Surat Ekspura	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	6 Laporan	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kegiatan Penindakan Pemunggal Pajak Daerah	Jumlah Laporan Penindakan Pemunggal Pajak	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	6 Laporan	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kegiatan Pemetaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pemetaan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	6 Laporan	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Program Perencanaan dan Pelaksanaan Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan pajak daerah	88,31	91,75	103,90	88,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pemetaan dan Pengembangan Keluasan Keseluruhan dan Informasi Pajak Daerah	Pengembangan/Perencanaan Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah	12 Aplikasi	11 Aplikasi	91,67	1 Aplikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Analisa dan Evaluasi Pemunggalan Pajak Daerah atau Survei Kepuasan WP atau Pelayanan Pajak	Jumlah dokumen survey kepuasan pelayanan pajak daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Utara	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah Bandung Utara	4 Laporan	4 Laporan	100,00	4 Laporan	2 Laporan	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Selatan	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah Bandung Selatan	4 Laporan	4 Laporan	100,00	4 Laporan	2 Laporan	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Barat	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah Bandung Barat	4 Laporan	4 Laporan	100,00	4 Laporan	2 Laporan	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Timur	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah Bandung Timur	4 Laporan	4 Laporan	100,00	4 Laporan	2 Laporan	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Tengah	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah Bandung Tengah	4 Laporan	4 Laporan	100,00	4 Laporan	2 Laporan	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IV	Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan PAD Bahan Pasak Daerah	Nilai SKM Pelayanan PAD Bahan Pasak Daerah	88,31	99,46	112,63%	86,35	-	-	-	-
18	Kegiatan Operasional Pengelolaan PAD Bahan Pasak Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kecepatan Pelayanan PAD Bahan Pasak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	6 Laporan	50	-	-
IV	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian pelayanan peningkatan administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	22,03%	22,03%	100%	-
20	Penyediaan jasa konsultasi, survei daya air dan listrik	Jumlah jasa konsultasi	13 Bulan	12 Bulan	100,00%	13 Bulan	6 Bulan	50,00%	12 bulan	-
21	Penyediaan jasa pemeliharaan dan pelatihan kendaraan operasional	Jumlah unit kendaraan yang dikelola	136 Unit	136 Unit	100,00%	137 Unit	-	-	337 Unit	-
22	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor bulanan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	12 Bulan	6 Bulan	50,00%	12 bulan	-
23	Pemeliharaan alat tulis kantor	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan ATK	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	6 Laporan	50,00%	12 Laporan	-
24	Penyediaan barang cetakan dan penggantian	Jumlah Laporan Pengadaan Cetakan dan Penggantian	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	6 Laporan	50,00%	12 Laporan	-
25	Penyediaan Koneksi Instalasi Listrik / Pemasangan Sumpitum Kantor	Jumlah Laporan Pemeliharaan Komponen Instalasi Listrik/Pemasangan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	-	-	1 Laporan	-
26	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17 Laporan	17 Laporan	100,00%	8 Laporan	3 Laporan	37,50%	12 Laporan	-
27	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	6 Laporan	50,00%	12 laporan	-
28	Penyediaan bahan besian dan peralatan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan besian	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	6 Laporan	50,00%	12 Laporan	-
29	Pemeliharaan bahan logistik kantor	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	6 Laporan	50,00%	12 laporan	-
30	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman bulanan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	6 Laporan	50,00%	12 Laporan	-
31	Biaya jasa koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	6 Laporan	50,00%	12 Laporan	-
32	Penyediaan jasa Pengamanan Kantor	Jumlah jasa pengamanan kantor	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	12 Bulan	6 Bulan	50,00%	-	-
V	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian peningkatan sarana dan prasarana peningkatan aparatur	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100%	-
33	Pengadaan meubelair	Jumlah jenis penggantian meubelair	2 jenis	2 jenis	100,00%	2 jenis	-	-	12 Laporan	-
34	Pembangunan rambu / beranda gedung kantor	Jumlah laporan pembangunan rambu/beranda gedung kantor	9 laporan	9 Laporan	100,00%	1 laporan	1 laporan	100,00%	12 Laporan	-
35	Pembangunan rambu / beranda perengalapan gedung kantor	Jumlah Laporan Pembangunan Gedung Kantor perengalapan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	6 Laporan	50,00%	12 Laporan	-

36	Penelitian Rasio/Perkula Menjual	Jumlah Laporan Maksimal terpublikasi	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	50,00%	12 Laporan	-	-
37	Rehabilitasi Sebang/Berat Cahang Kanti	persah unit rehabilitasi sebang/berat geoteng kance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Program peningkatan disiplin aparat	Capaian peningkatan disiplin aparat	100%	100,00%	100,00%	0%	-	-	100%	100%	-	-
38	Pengadaan pakuhan dinas beserta perlengkapan	jumlah pakuhan dinas beserta perlengkapannya	631 Snd	631 Snd	100,00%	0 Snd	-	-	-	5nd	-	-
VII	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian peningkatan kapasitas sumber daya aparat	100%	100,00%	100,00%	100%	33,85%	33,85%	33,85%	100%	-	-
39	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyenggaraan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Kali	1 Kali	100,00%	0 Kali	-	-	-	1 Kali	-	-
40	Beberapa tahun implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Penyenggaraan Beberapa Tahun Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	6 Laporan	50,00%	12 Laporan	-	-	-
41	Kegiatan Perencanaan Kinerja Aparatur	Jumlah penyenggaraan pembinaan kinerja aparat	1 Kali	1 Kali	100,00%	1 Kali	1 Kali	100	-	-	-	-

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG

Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dapat dilihat dari tercapainya Indikator Kinerja sesuai dengan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023 yaitu Tercapainya Target Pajak Daerah. Untuk tahun 2019, seperti yang tercantum dalam tabel Realisasi Indikator Kinerja di bawah ini :

Tabel 2.2
Capaian indikator Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Nilai SKM Pelayanaan Pajak Daerah			88,31	88,35	88,40	88,45	92,18	-	88,45	88,50
2	Nilai SKM Pelayanaan PAD bukan Pajak Daerah			88,31	88,35	88,40	88,45	99,28	-	88,45	88,50
3	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah			2.559.095.636.533,77	2.259.552.659.6932	2.13.000.000.0002	2.898.122.897,465	2.154.648.077.249	596.954.341.522	2.898.122.897,465	3.082.342.305,461
4	Persentase meningkatnya Wajib Pajak yang membayar Pajak Daerah			75	80	82	84	94,36	-	84	85

Catatan : Data per 30 Juni 2020

2.3 ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG

Era otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber penerimaan daerah khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Pajak Daerah oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung sebagai lembaga teknis penghasil PAD dalam bidang Pajak Daerah.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1405 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, dengan dilandasi oleh isu penting penyelenggaraan tugas dalam sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, hal tersebut merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang terbagi dalam kurun waktu tahunan sesuai penentuan APBD.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dihadapkan pada beberapa permasalahan, yaitu :

1. Kesesuaian regulasi pajak daerah dengan kondisi pelaku usaha di Kota Bandung yang terus berkembang secara dimanis, khususnya untuk Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah;
2. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban untuk membayar pajak dan kurangnya pengetahuan masyarakat/pelaku usaha di Kota Bandung terkait aturan yang menjadikan mereka sebagai wajib pajak;

3. Belum lancarnya konektivitas sistem yang mendorong akuntabilitas dan transparansi pajak antara wajib pajak dengan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, dalam hal ini berkaitan dengan manajemen sistem informasi pelayanan pajak daerah, khususnya pelayanan yang berbasis Informasi dan Teknologi (IT).
4. Tantangan dalam hal profesionalisme dan integritas SDM Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong atas pelayanan yang diberikan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Berikut faktor penghambat dan faktor pendorong yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Faktor Penghambat:

INTERNAL

1. Kualitas dan penempatan SDM
 - Belum optimalnya SDM yang terlatih, khususnya dalam bidang audit pajak dan audit pajak berbasis Teknologi;
2. Pengelolaan piutang pajak daerah belum optimal;
3. Regulasi yang lambat dalam mengantisipasi untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada/terkini;

EKSTERNAL

1. Kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak terhadap pajak daerah masih kurang;
2. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi vertikal;
3. Penetapan target pajak daerah masih berdasarkan pada beban kebutuhan belanja daerah, bukan berdasarkan data potensi yang ada;
4. Adanya pandemi Covid 19 yang menyebabkan kondisi ekonomi menurun drastis, dan dimungkinkan butuh waktu lama untuk pemulihan.

Faktor Pendorong

INTERNAL

1. Adanya *Political Will* dari Kepala Daerah;
2. Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai dengan jumlah petugas pajak yang memadai;
3. Telah tersedianya infrastruktur sistem informasi teknologi di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

EKSTERNAL

1. Pertumbuhan wisata dan pelaku usaha wisata yang tinggi;
2. Minat para pelaku usaha untuk berinvestasi di Kota Bandung;
3. Mobilitas penduduk luar Bandung untuk bekerja dan menetap untuk belajar di Kota Bandung tetap tinggi;

2.4 Review terhadap RKPD

TABEL 2.4

REVIU TERHADAP RKPD TAHUN 2019

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG

NO.	RANWAL RKPD TAHUN 2019					HASIL ANALISA KEBUTUHAN TAHUN 2019					CATATAN PENTING
	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Program Perencanaan dan Pengembangan an Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	BPPD	2,436,311,729,898	2,541,188,850	Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	2,436,311,729,898	2,541,188,850		
1	Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Data dan Potensi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Potensi Pajak Daerah	BPPD	4 Laporan	80,800,000	Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Data dan Potensi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Potensi Pajak Daerah	4 Laporan	80,800,000		

2	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah	Jumlah dokumen kajian Pajak Reklame / PAT	BPPD	1 Dokumen	397,360,300	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah	Jumlah dokumen kajian Pajak Reklame / PAT	1 Dokumen	397,360,300	
3	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Jumlah dokumen kajian Pajak Bumi dan Bangunan	BPPD	1 Dokumen	1,177,727,650	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Jumlah dokumen kajian Pajak Bumi dan Bangunan	1 Dokumen	1,177,727,650	
4	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak BPHTB dan PPT	Jumlah laporan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak BPHTB dan PPT	BPPD	4 laporan	315,497,000	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak BPHTB dan PPT	Jumlah laporan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak BPHTB dan PPT	4 laporan	315,497,000	
5	Kegiatan Penyesuaian Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah	Jumlah Raperwal/ Rakepwal/ Raporda	BPPD	1 Dokumen	162,357,800	Kegiatan Penyesuaian Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah	Jumlah Raperwal/ Rakepwal/ Raporda	1 Dokumen	162,357,800	
6	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir	Jumlah laporan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir	BPPD	4 laporan	294,525,600	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir	Jumlah laporan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir	4 laporan	294,525,600	

7	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran	Jumlah laporan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran	BPPD	4 laporan	112,920,500	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran	Jumlah laporan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran	4 laporan	112,920,500	
II	Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	BPPD	75%	5,535,402,000	Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	75%	5,535,402,000	
8	Kegiatan Penyuluhan Tertib Administrasi Pajak Daerah	Jumlah Penyuluhan dan Penyempaian Informasi Pajak Daerah melalui surat kabar, radio, televisi, website, dan sosialisasi tatap muka	BPPD	" Surat kabar 23 tayang, Radio lokal 6 tayang, Televisi lokal 6 tayang, website 22 paket, dan, Sosialisasi tatap muka 9 kali	2,880,450,000	Kegiatan Penyuluhan Tertib Administrasi Pajak Daerah	Jumlah Penyuluhan dan Penyempaian Informasi Pajak Daerah melalui surat kabar, radio, televisi, website, dan sosialisasi tatap muka	" Surat kabar 23 tayang, Radio lokal 6 tayang, Televisi 6 tayang, website 22 paket, dan, Sosialisasi tatap muka 9 kali	2,880,450,000	
9	Kegiatan Pembinaan Wajib Pajak Daerah	"Jumlah laporan Pelayanan Pengaduan	BPPD	12 Laporan	1,512,960,000	Kegiatan Pembinaan Wajib Pajak Daerah	"Jumlah laporan Pelayanan Pengaduan	Laporan 12 Laporan	1,512,960,000	
10	Kegiatan Penindakan Penunggak Pajak Daerah	Jumlah laporan penertiban surat teguran"	BPPD	12 Laporan	1,075,992,000	Kegiatan Penindakan Penunggak Pajak Daerah	Jumlah laporan penertiban surat teguran"	12 Laporan	1,075,992,000	

11	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pemeriksaan	BPPD	12 Laporan	66,000,000	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pemeriksaan	12 Laporan	66,000,000	
III	Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah	BPPD	88,31	5,652,411,584	Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah	88,31	5,652,411,584	
12	Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Pajak Daerah	- Jumlah Pengembangan n/ Peneliharaan Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah	BPPD	15 Aplikasi	4,259,358,640	Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Pajak Daerah	- Jumlah Pengembangan n/ Peneliharaan Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah	15 Aplikasi	4,259,358,640	
13	Kegiatan Analisa dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah atau Survei Kepuasan WP atas Pelayanan Pajak	Jumlah Dokumen Survei Kepuasan Wajib Pajak atas Pelayanan Pajak	BPPD	1 Dokumen	182,011,000	Kegiatan Analisa dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah atau Survei Kepuasan WP atas Pelayanan Pajak	Jumlah Dokumen Survei Kepuasan Wajib Pajak atas Pelayanan Pajak	1 Dokumen	182,011,000	
14	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Utara	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Utara	BPPD	4 Laporan	154,849,062	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Utara	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Utara	4 Laporan	154,849,062	

15	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Selatan	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah Bandung Selatan	BPPD	4 Laporan	158,542,850	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Selatan	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah Bandung Selatan	4 Laporan	158,542,850	
16	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Barat	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah Bandung Barat	BPPD	4 Laporan	128,436,401	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Barat	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah Bandung Barat	4 Laporan	128,436,401	
17	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Timur	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah Bandung Timur	BPPD	4 Laporan	339,950,705	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Timur	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah Bandung Timur	4 Laporan	339,950,705	
18	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Tengah	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah Bandung Tengah		4 Laporan	429,262,926	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Tengah	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah Bandung Tengah	4 Laporan	429,262,926	
IV	Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan	Nilai SKM Pelayanan PAD Bukan Pajak Daerah	BPPD	88,31	52,635,000	Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan PAD Bukan	Nilai SKM Pelayanan PAD Bukan Pajak Daerah	88,31	52,635,000	

	PAD Bukan Pajak Daerah					Pajak Daerah				
19	Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah	BPPD	12 Laporan	52,635,000	Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah	12 Laporan	52,635,000	
V	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	BPPD	100%	12,041,791,150	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	12,041,791,150	
20	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa bulanan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	BPPD	12 bulan	284,652,541	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa bulanan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan	284,652,541	
21	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara	BPPD	158 Unit	2,331,535,299	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara	158 Unit	2,331,535,299	
22	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa bulanan penyediaan jasa kebersihan kantor	BPPD	12 Bulan	1,028,479,400	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa bulanan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	1,028,479,400	
23	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan	BPPD	12 Laporan	1,411,614,007	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan	12 Laporan	1,411,614,007	

		penyediaan ATK					penyediaan ATK				
24	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah laporan pengandaan cetakan dan pengandaan	BPPD	12 Laporan	273,533,659	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah laporan pengandaan cetakan dan pengandaan	12 Laporan	273,533,659		
25	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	BPPD	1 Laporan	151,789,296	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	1 Laporan	151,789,296		
26	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	BPPD	22 laporan	2,896,084,276	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	22 laporan	2,896,084,276		
27	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga	BPPD	12 laporan	195,577,672	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga	12 laporan	195,577,672		
28	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPPD	12 Laporan	41,664,000	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Laporan	41,664,000		
29	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah laporan penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPPD	12 laporan	232,850,200	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah laporan penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 laporan	232,850,200		

30	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan kegiatan penyediaan makanan dan minuman bulanan	BPPD	12 Laporan	1,225,523,000	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan kegiatan penyediaan makanan dan minuman bulanan	12 Laporan	1,225,523,000	
31	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	BPPD	12 Laporan	1,500,000,000	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Laporan	1,500,000,000	
32	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah jasa bulanan pengamanan kantor	BPPD	12 Bulan	468,487,800	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah jasa bulanan pengamanan kantor	12 Bulan	468,487,800	
VI	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	BPPD	100%	2,350,233,700	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100%	2,350,233,700	
33	Kegiatan Pengadaan Mebelair	Jumlah jenis pengadaan Mebelair	BPPD	2 jenis	350,742,700	Kegiatan Pengadaan Mebelair	Jumlah jenis pengadaan Mebelair	2 jenis	350,742,700	
34	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BPPD	9 Laporan	1,726,416,000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	9 Laporan	1,726,416,000	
35	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perangkatan Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Perangkatan Gedung Kantor terpelihara	BPPD	12 Laporan	194,700,000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perangkatan Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Perangkatan Gedung Kantor terpelihara	12 Laporan	194,700,000	

36	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair	Jumlah laporan Mebeulair terpeliharaan	BPPD	12 Laporan	78,375,000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair	Jumlah laporan Mebeulair terpeliharaan	12 Laporan	78,375,000	
VII	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	- Tingkat Disiplin Aparatur	BPPD	100%	408,285,000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	- Tingkat Disiplin Aparatur	100%	408,285,000	
37	Kegiatan Pengadaan Pakakan Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakakan dinas beserta perlengkapannya	BPPD	661 Stel	408,285,000	Kegiatan Pengadaan Pakakan Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakakan dinas beserta perlengkapannya	661 Stel	408,285,000	
VIII	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	BPPD	100%	1,000,500,000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	1,000,500,000	
38	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BPPD	1 Kali	103,200,000	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Kali	103,200,000	
39	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BPPD	12 Laporan	532,900,000	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	532,900,000	

40	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah penyelenggara raan Pembinaan Kinerja Aparatur	BPPD	1 Kali	364,400,000	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah penyelenggara raan Pembinaan Kinerja Aparatur	1 Kali	364,400,000	
TOTAL					29,582,447,284				29,582,447,284	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.5

**Usulan Program dan Kegiatan dari
Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6
NON URUSAN					
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	BPPD	100%	
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa bulanan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	BPPD	12 bulan	
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara	BPPD	157 unit	
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa bulanan penyediaan jasa kebersihan kantor	BPPD	12 Bulan	
4	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan ATK	BPPD	12 Laporan	
5	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan pengadaan cetakan dan penggandaan	BPPD	12 Laporan	
6	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	BPPD	1 Laporan	
7	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	BPPD	9 laporan	
8	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga	BPPD	12 laporan	
9	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	BPPD	12 Laporan	
10	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah laporan penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPPD	12 laporan	

11	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan kegiatan penyediaan makanan dan minuman bulanan	BPPD	12 Laporan	
12	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	BPPD	12 Laporan	
13	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah jasa bulanan pengamanan kantor	BPPD	12 Bulan	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	BPPD	100%	
14	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	Jumlah Laporan pengadaan Mebeulair	BPPD	3 Jenis	
15	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BPPD	1 Laporan	
16	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah laporan Perlengkapan Gedung Kantor terpelihara	BPPD	12 Laporan	
17	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair	Jumlah laporan Mebeulair terpelihara	BPPD	12 Laporan	
18	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	BPPD	1 Laporan	
19	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	BPPD	100%	
III	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	BPPD	661 Stel	
20	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	BPPD	100%	
IV	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BPPD	1 Kali	
21	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BPPD	12 Laporan	
22	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah penyelenggaraan Pembinaan Kinerja Aparatur	BPPD	1 Kali	

URUSAN WAJIB					
V	Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	BPPD	2,522,552,659,693	
23	Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Data dan Potensi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Potensi Pajak Daerah	BPPD	4 Dokumen	
24	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah	Jumlah dokumen kajian Pajak Reklame / PAT	BPPD	1 Dokumen	
25	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Jumlah dokumen kajian Pajak Bumi dan Bangunan	BPPD	1 Dokumen	
26	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak BPHTB dan PPJ	Jumlah laporan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak BPHTB dan PPJ	BPPD	4 laporan	
27	Kegiatan Penyesuaian Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah	Jumlah Raperwal/ Rakepwal/ Raperda	BPPD	1 Dokumen	
28	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir	Jumlah laporan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir	BPPD	4 Dokumen	
29	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran	Jumlah laporan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hotel dan Pajak restoran	BPPD	4 Dokumen	
VI	Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	BPPD	75%	
30	Kegiatan Penyuluhan Tertib Administrasi Pajak Daerah	Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui surat kabar, radio, televisi, website, dan sosialisasi tatap muka	BPPD	Surat kabar 33 tayang , Radio lokal 771 tayang, Televisi lokal 378 tayang, website 18 paket, dan Sosialisasi tatap muka 4 kali	
31	Kegiatan Pembinaan Wajib Pajak Daerah	Jumlah laporan Pelayanan Pengaduan Jumlah laporan penerbitan surat teguran	BPPD	12 Laporan 12 Laporan	
32	Kegiatan Penindakan Penunggak Pajak Daerah	Jumlah laporan Penindakan Penunggak Pajak	BPPD	12 Laporan	
33	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pemeriksaan	BPPD	12 Laporan	
VII	Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah	BPPD	88,31	

34	Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Pajak Daerah	- Jumlah Pengembangan/ Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah - Perencanaan Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah	BPPD	12 Aplikasi 1 Aplikasi	
35	Kegiatan Analisa dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah atau Survei Kepuasan WP atas Pelayanan Pajak	Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Wajib Pajak atas Pelayanan Pajak	BPPD	2 Dokumen	
36	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Utara	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Utara	BPPD	4 Laporan	
37	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Selatan	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Selatan	BPPD	4 Laporan	
38	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Barat	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Barat	BPPD	4 Laporan	
39	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Timur	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Timur	BPPD	4 Laporan	
40	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Tengah	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung tengah		4 Laporan	
viii	Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah	Nilai SKM Pelayanan PAD Bukan Pajak Daerah	BPPD	88,31	
41	Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah	BPPD	12 Laporan	

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, tidak ada usulan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan PD, LSM, asosiasi-asosiasi, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi BPPD Kota Bandung dari penelitian lapangan dan pengamatan, serta dari pelaksanaan Musrenbang tahun ini.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2021

a. Tujuan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

Dalam pencapaian tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) tahun kedepan. Berdasarkan uraian diatas, maka Ranwal Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung disusun dengan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan Kota Bandung sesuai dengan **Visi "TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS"** atau mewujudkan yang diartikan sebagai kota yang mempunyai jati diri, dan kebanggaan bagi seluruh warganya, memiliki pelayanan publik prima tanpa membedakan status. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, ataupun kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai di masa mendatang.

Karakteristik rumusan tujuan yang mendasar adalah harus realistis dan dapat dicapai. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan tujuan Ranwal Rencana Kerja antara lain:

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi PD yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
2. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Berdasarkan penjelasan visi, maka Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung menetapkan tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah.
2. Tercapainya Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Pajak Daerah.

b. Sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan.

Berdasarkan pengertian tersebut, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung menetapkan sasaran organisasi sebagai berikut:

- a. Sasaran atas tujuan Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah adalah:
 - Tercapainya target Penerimaan Pajak Daerah dengan Indikator Sasaran Jumlah pendapatan pajak daerah:
 1. Pajak Hotel
 2. Pajak Restoran
 3. Pajak Hiburan
 4. Pajak Parkir
 5. Pajak BPHTB
 6. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
 7. Pajak Reklame
 8. Pajak Air Tanah
 9. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

- Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak Daerah dengan indikator sasaran: Persentase Meningkatnya Wajib Pajak yang Membayar Pajak Daerah.
2. Sasaran atas Tujuan Tercapainya Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dengan Sasarannya adalah: Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Pajak Daerah dengan Indikator Sasarannya adalah
- a. SKM Pelayanan Pajak Daerah;
 - b. SKM Pelayanan PAD bukan Pajak Daerah.

Tabe 3.1
Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
1.	Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah.	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah : 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Parkir 5. Pajak BPHTB 6. PPJ 7. Pajak Reklame 8. Pajak Air Tanah 9. PBB
2.	Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Daerah.	Persentase Meningkatnya Wajib Pajak yang Membayar Pajak Daerah
3.	Meningkatnya Kualitas	IKM Pelayanan Pajak Daerah

3.2 Target Pajak Daerah Tahun 2021

Adapun target Pendapatan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 2,691,062,135,340.- yang terbagi kedalam 9 jenis mata pajak.

Tabel 3.2
Proyeksi Target Pendapatan Pajak Daerah
Tahun 2021

JENIS PAJAK		TARGET (RP)
1	Pajak Hotel	305.000.000.000
2	Pajak Restoran	350.000.000.000
3	Pajak Hiburan	90.000.000.000
4	Pajak Parkir	45.000.000.000
5	PPJ	205.000.000.000
6	BPHTB	550.000.000.000
7	Pajak Air Tanah	33.000.000.000
8	Pajak Reklame	35.000.000.000
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	600.000.000.000
JUMLAH		2.213.000.000.000

B A B IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2021

4.1 Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2021

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan sebagaimana ditetapkan dalam strategi, selanjutnya dalam menetapkan program telah dipertimbangkan "siapa melakukan apa" dan jangka waktu penyelesaiannya.

Dengan demikian program adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana aksi terpadu yang meliputi:

- Penetapan kebijakan
- Program operasional
- Kegiatan/aktivitas

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kegiatan merupakan titik awal menuju perwujudan misi dan visi.

Kriteria Kegiatan adalah sebagai berikut:

- Spesifik
- Terukur
- Agresif
- Berorientasi kepada hasil
- Memiliki jangka waktu tertentu

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dengan indikator kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dalam RPJMD 2018-2023 yaitu pencapaian target pendapatan daerah maka program-program yang akan dilaksanakan meliputi :

Program Urusan Wajib :

- (1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (2) Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah;
- (3) Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah;
- (4) Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah.

Program Non Urusan :

- (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Sedangkan nomenklatur/kodefikasi yang sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Program Urusan Wajib :

- (1) PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Program Non Urusan :

- (2) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH;

Adapun untuk merealisasikan program-program tersebut di atas, maka rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2021
Program/Kegiatan berdasarkan Permendagri 13

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	5	6
I	Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	2.213.000.000.000	8,662,286,713
1	Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Data dan Potensi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Potensi Pajak Daerah	4 Laporan	120,000,000
2	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah	Jumlah dokumen kajian Pajak Reklame / PAT	1 Dokumen	480,805,963
3	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Jumlah dokumen kajian Pajak Bumi dan Bangunan	2 Dokumen	6,781,724,550
4	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak BPHTB dan PPJ	Jumlah laporan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak BPHTB dan PPJ	4 laporan	382,000,000
5	Kegiatan Penyesuaian Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah	Jumlah Raperwal/ Rakepwal/ Raperda	1 Dokumen	117,756,200
6	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir	Jumlah laporan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir	4 laporan	440,000,000
7	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran	Jumlah laporan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hotel dan Pajak restoran	4 laporan	340,000,000
II	Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	75%	6,460,564,650
8	Kegiatan Penyuluhan Tertib Administrasi Pajak Daerah	Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak	Surat kabar 30 tayang, Radio lokal 9 tayang, Televisi lokal 9	3,643,769,250

		Daerah melalui surat kabar, radio, televisi, website, dan sosialisasi tatap muka	tayang, website 30 paket, dan Sosialisasi tatap muka 9 kali	
9	Kegiatan Pembinaan Wajib Pajak Daerah	Jumlah laporan Pelayanan Pengaduan Jumlah laporan penerbitan surat teguran	12 Laporan 12 Laporan	1,668,038,400
10	Kegiatan Penindakan Penunggak Pajak Daerah	Jumlah laporan Penindakan Penunggak Pajak	12 Laporan	1,075,992,000
11	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pemeriksaan	12 Laporan	72,765,000
III	Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah	88,40	5,224,442,227
12	Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Pajak Daerah	- Jumlah Pengembangan/ Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah	12 Aplikasi	3,759,358,640
13	Kegiatan Analisa dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah atau Survei Kepuasan WP atas Pelayanan Pajak	Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Wajib Pajak atas Pelayanan Pajak	2 Dokumen	215,000,000
14	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Utara	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Utara	4 Laporan	159,072,485
15	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Selatan	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Selatan	4 Laporan	396,357,125
16	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Barat	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Barat	4 Laporan	141,601,132
17	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Timur	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Timur	4 Laporan	209,642,504

18	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Tengah	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung tengah	4 Laporan	343,410,341
IV	Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah	Nilai SKM Pelayanan PAD Bukan Pajak Daerah	88,31	63,688,350
19	Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah	12 Laporan	63,688,350
V	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	12,224,539,108
20	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa bulanan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan	210,000,000
21	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara	129 Unit roda dua; 26 unit roda 4; 3 bis pelayanan	2,820,400,000
22	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa bulanan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	1,248,500,000
23	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan ATK	12 Laporan	990,000,000
24	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan pengadaan cetakan dan penggandaan	12 Laporan	300,000,000
25	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	12 Laporan	173,250,000
26	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	12 laporan	2,500,000,000
27	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga	12 laporan	157,500,000
28	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan penyediaan bahan bacaan dan peraturan	12 Laporan	47,250,000

		perundang undangan		
29	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah laporan penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 laporan	210,000,000
30	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan kegiatan penyediaan makanan dan minuman bulanan	12 Laporan	1,351,139,107.50
31	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Laporan	1,650,000,000
32	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah jasa bulanan pengamanan kantor	12 Bulan	566,500,000
VI	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100%	1,570,000,000
33	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	Jumlah jenis pengadaan Mebeulair	12 Laporan	200,000,000
34	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 Laporan	1,100,000,000
35	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah laporan Perlengkapan Gedung Kantor terpelihara	12 Laporan	195,000,000
36	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair	Jumlah laporan Mebeulair terpelihara	12 Laporan	75,000,000
VII	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	- Tingkat Disiplin Aparatur	100%	495,000,000
37	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	661 Stel	495,000,000
VIII	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	1,118,250,000
38	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Kali	120,750,000

39	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	577,500,000
40	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah penyelenggaraan Pembinaan Kinerja Aparatur	1 Kali	420,000,000
TOTAL				35,818,771,048

**Program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2021 berdasarkan
Permendagri 90 Tahun 2019**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	5	6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai IKM Pelayanan Pajak Daerah	100 %	87.799.588.948
1	Administrasi Keuangan			74.384.219.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	74.384.219.000
2	Kegiatan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	100 %	12.803.485.860
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	185.725.900
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	157 unit	1.323.449.860
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor	12 bulan	1.323.449.860
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Laporan	1.321.501.610
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan	12 Laporan	596.862.120
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	"Tersedianya Komponen Instalasi	1 Laporan	324.668.700
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor"	1 laporan	1.506.992.520
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan	173.775.800
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Laporan	27.264.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-	12 Laporan	1.151.220.000

		undangan		
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya bahan logistik kantor	12 Laporan	801.045.000
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya makanan dan minuman	12 Laporan	999.912.000
	Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	1 Laporan	511.510.120
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2 Laporan	1.264.881.640
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 Laporan	194.315.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	12 Laporan	74.864.790
2	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Dokumen Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		611.884.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	284 Stel	184.884.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1 Kali	112.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Kinerja Aparatur	12 Laporan	315.000.000
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	1.2508.426.850	12.508.426.850
3	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah		12.508.426.850
	Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Potensi Pajak Daerah, Pajak Restoran dan Pajak Reklame	3 Dokumen	1.298.957.200
	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Raperda/Raperwal/Rakepwal	1 Dokumen	57.100.000
	Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	- Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui Surat Kabar - Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui Radio - Jumlah Penyuluhan dan	4552 mmk 880 Tayang/spot 420 Tayang/spot 16 Paket	1.953.355.000

		Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui Televisi - Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui Website - Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui Sosialisasi Tatap Muka	5 Paket	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	- Jumlah Perencanaan Aplikasi Pengelolaan Pajak Daerah - Jumlah Pengembangan/ Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah	1 Aplikasi	4.077.569.000
	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Kajian Pajak Air Tanah	1 Aplikasi	2.265.215.650
	Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Kajian Pajak Bumi dan Bangunan	1 Dokumen	2.725.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak BPHTB dan PPJ	1	131.230.000
TOTAL				100.308.015.790

4.2 Pendanaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Rencana Kerja Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2021 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi Perangkat Daerah pelaksana program/kegiatan, Ranwal Rencana Kerja Tahun 2021 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kerangka anggaran Tahun 2021 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas.

Pelaksanaan kegiatan Ranwal Rencana Kerja Tahun 2021 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar Perangkat Daerah, Perangkat Daerah dengan Pemerintah Kota maupun Perangkat Daerah dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Tabel 4.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD PADA RKPD PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
URUSAN WAJIB										
1	Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	BPPD	2.213.000.000.000	8,662,286,713			2,898,122,897,465	8,118,093,030	
1	Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Data dan Potensi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Potensi Pajak Daerah	BPPD	4 Laporan	120,000,000	APBD		5 Laporan	450,000,000	
2	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah	Jumlah dokumen kajian Pajak Reklame / PAT	BPPD	1 Dokumen	480,805,963	APBD		1 Dokumen	528,886,560	
3	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Jumlah dokumen kajian Pajak Bumi dan Bangunan	BPPD	2 Dokumen	6,781,724,550	APBD		2 Dokumen	5,791,450,270	
4	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak BPHTB dan PPT	Jumlah laporan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak BPHTB dan PPT	BPPD	4 laporan	382,000,000	APBD		4 laporan	420,000,000	

5	Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah	Jumlah Raperwal/ Rakerwal/ Raperda	BPPD	1 Dokumen	117,756,200	APBD		1 Dokumen	117,756,200
6	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir	Jumlah laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir	BPPD	4 laporan	440,000,000	APBD		4 laporan	460,000,000
7	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran	Jumlah laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hotel dan Pajak restoran	BPPD	4 laporan	340,000,000	APBD		4 laporan	350,000,000
II	Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	BPPD	75%	6,460,564,650			75%	6,911,981,745
8	Kegiatan Penyuluhan Tertib Administrasi Pajak Daerah	Jumlah Penyuluhan dan Penyempulan Informasi Pajak Daerah melalui surat kabar, radio, televisi, website, dan sosialisasi tatap muka	BPPD	Surat kabar 30 tayang, Radio lokal 9 tayang, Televisi lokal 9 tayang, website 30 paket, dan Sosialisasi tatap muka 9 kali	3,643,769,250	APBD		Surat kabar 30 tayang, Radio lokal 9 tayang, Televisi lokal 9 tayang, website 30 paket, dan Sosialisasi tatap muka 9 kali	4,008,146,175
9	Kegiatan Pembinaan Wajib Pajak Daerah	Jumlah laporan Pelayanan Pengaduan Jumlah laporan pemberian surat teguran	BPPD	12 Laporan 12 Laporan	1,668,038,400	APBD		12 Laporan 12 Laporan	1,751,440,320
10	Kegiatan Peningkatan Penunggak Pajak Daerah	Jumlah laporan Penindakan	BPPD	12 Laporan	1,075,992,000	APBD		12 Laporan	1,075,992,000

		Pemunggak Pajak							
11	Kegiatan Pemertiksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pemeriksaan	BPPD	12 Laporan	72,765,000	APBD		12 Laporan	76,403,250
III	Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah	BPPD	88,31	5,224,442,227			88,31	5,545,010,890
12	Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Pajak Daerah	- Jumlah Pengembangan/ Penelitiaan Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah	BPPD	12 Aplikasi	3,759,358,640	APBD		12 Aplikasi	3,959,358,640
13	Kegiatan Analisa dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah atau Survei Kepuasan WP atas Pelayanan Pajak	Jumlah Dokumen Survei Kepuasan Wajib Pajak atas Pelayanan Pajak	BPPD	2 Dokumen	215,000,000	APBD		2 Dokumen	235,000,000
14	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Utara	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Utara	BPPD	4 Laporan	159,072,485	APBD		4 Laporan	162,807,540
15	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Selatan	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Selatan	BPPD	4 Laporan	396,357,125	APBD		4 Laporan	475,628,550
16	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Barat	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Barat	BPPD	4 Laporan	141,601,132	APBD		4 Laporan	148,681,189

17	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Timur	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Timur	BPPD	4 Laporan	209,642,504	APBD		4 Laporan	220,124,630
18	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Tengah	Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung tengah		4 Laporan	343,410,341	APBD		4 Laporan	343,410,341
IV	Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah	Nilai SKM Pelayanan PAD Bukan Pajak Daerah	BPPD	88,31	63,688,350			88,31	70,057,185
19	Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah	BPPD	12 Laporan	63,688,350	APBD		12 Laporan	70,057,185
NON URUSAN									
V	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	BPPD	100%	12,224,539,108			100%	12,960,536,063
20	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa bulanan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	BPPD	12 bulan	210,000,000	APBD		12 bulan	220,500,000
21	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan-kendaraan dinas/operasional terpelihara	BPPD	129 Unit roda dua; 26 unit roda 4; 3 bis pelayanan	2,820,400,000	APBD		129 Unit roda dua; 26 unit roda 4; 3 bis	3,102,440,000

30	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan kegiatan penyediaan makanan dan minuman bulanan	BPPD	12 Laporan	1,351,139,107.50	APBD		12 Laporan	1,418,696,062.88
31	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	BPPD	12 Laporan	1,650,000,000	APBD		12 Laporan	1,815,000,000
32	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah jasanya pengamanan kantor	BPPD	12 Bulan	566,500,000	APBD		12 Bulan	623,150,000
VI	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	BPPD	100%	1,570,000,000			100%	1,680,000,000
33	Kegiatan Pengadaan Meubelair	Jumlah Laporan pengadaan Meubelair	BPPD	12 Laporan	200,000,000	APBD		12 Laporan	200,000,000
34	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BPPD	12 Laporan	1,100,000,000	APBD		12 Laporan	1,210,000,000
35	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Penyelenggaraan Gedung Kantor	Jumlah laporan Penyelenggaraan Gedung Kantor terpelihara	BPPD	12 Laporan	195,000,000	APBD		12 Laporan	195,000,000
36	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Jumlah laporan Meubelair terpelihara	BPPD	12 Laporan	75,000,000	APBD		12 Laporan	75,000,000
VII	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	BPPD	100%	495,000,000			100%	544,500,000
37	Kegiatan Pengadaan Pakaihan Dinas Berستا Perengkapannya	Jumlah pakaihan dinas berستا perengkapannya	BPPD	661 Stel	495,000,000	APBD		661 Stel	544,500,000

VIII	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	BPPD	100%	1,118,250,000			100%	1,174,162,500
38	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BPPD	1 Kali	120,750,000	APBD		1 Kali	126,787,500
39	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BPPD	12 Laporan	577,500,000	APBD		12 Laporan	606,375,000
40	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah penyelenggaraan Pembinaan Kinerja Aparatur	BPPD	1 Kali	420,000,000	APBD		1 Kali	441,000,000
		TOTAL			35,818,771,048				37,004,341,412

NOMENKLATUR/KODEFIKASI BERDASARKAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 :

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KEUANGAN								
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	BPPD	2.213.000.000,000	12.508.426,850				
1	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah	BPPD		12.508.426,850				
	Penyusunan: Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Potensi Pajak Daerah, Pajak Restoran dan Pajak Reklame	BPPD	3 Dokumen	1.298.957.200	APBD			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Raperda/Raperwal/ Rakepwal	BPPD	1 Dokumen	57.100.000	APBD			
	Penusunan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	- Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui Surat Kabar - Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui Radio - Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui Televisi - Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui Webste - Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi	BPPD	4552 mmk 880 Tayang/spot 420 Tayang/spot 16 Paket 5 Paket	1.953.355.000	APBD			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGI- ATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021					CATTA TAN PENT ING	PERKIRAAN MAJU	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	RENCANA TAHUN 2021		RENCANA TAHUN 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	- Jumlah Perencanaan Aplikasi Pengelolaan Pajak Daerah - Jumlah Pengembangan/ Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Kajian Pajak Air Tanah Jumlah Dokumen Kajian Pajak Bumi dan Bangunan Jumlah Dokumen Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak BPTT dan PPJ Jumlah Dokumen Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Jumlah Dokumen Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran	BPPD	1 Aplikasi 1 Aplikasi	4.077.569.000	APBD				
	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		BPPD	1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen	2.265.215.650	APBD				

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGI- ATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATAN PERT ING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan Pengaduan dan Pemberian Surat Teguran Jumlah Laporan Penindakan Penunggak Pajak Jumlah Laporan Pemeriksaan	BPPD	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	2.725.000.000	APBD			
	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah	BPPD	12 Laporan	131.230.000	APBD			
II PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
2	Administrasi Keuangan		BPPD	100 %	87.799.598.940				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhnya Gaji dan Tunjangan ASN	BPPD	14 Bulan	74.384.219.080				
			BPPD		24.384.219.080				

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Kegiatan Administrasi Umum		BPPD	100 %	12.803.485.860				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Bulanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	BPPD	12 bulan	185.725.900	APBD			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Terpelihara	BPPD	157 unit	1.323.449.860	APBD			
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	BPPD	12 bulan	1.323.449.860	APBD			
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan ATK	BPPD	12 Laporan	1.321.501.610	APBD			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penggandaan Cetak dan Penggandaan	BPPD	12 Laporan	596.862.120	APBD			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi	BPPD	1 Laporan	324.668.700	APBD			
	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan	BPPD	1 laporan	1.506.992.520	APBD			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGI- ATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATI TAN PENT ING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perengkapan Kantor	dan Perengkapan Kantor							
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPPD	12 laporan	173.775.800	APBD			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPPD	12 Laporan	27.264.000	APBD			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPPD	12 Laporan	1.151.220.000	APBD			
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	BPPD	12 Laporan	801.045.000	APBD			
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	BPPD	12 Laporan	999.912.000	APBD			
	Pengadaan Meubelair	Jumlah Jenis Pengadaan Meubelair	BPPD	1 Laporan	511.510.120	APBD			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATAN PERT ING	PERKIRAAN MAJU	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		RENCANA TAHUN 2022	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	BPPD	2 Laporan	1.264.881.640	APBD			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Laporan Perlengkapan Gedung Kantor Terpelihara	BPPD	12 Laporan	194.315.000	APBD			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelur	Jumlah Laporan Meubelur Terpelihara	BPPD	12 Laporan	74.864.790	APBD			
3	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		BPPD		611.894.000				
	Pengadaan Pakaiannya Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaiannya Dinas Beserta Perlengkapannya	BPPD	284 Setel	184.884.000	APBD			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	BPPD	1 kali	112.000.000	APBD			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Perundang-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	BPPD	12 Laporan	315.000.000	APBD			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATTA TAN PENT ING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	undangan	Perundang-undangan			100.308.015.790				

B A B V

P E N U T U P

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2021 mengakomodir nomenklatur/ kodifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019, Renja BPPD sendiri merupakan penjabaran proses perencanaan kegiatan dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2018-2023 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, dimana proses perencanaan yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung sebagaimana tercantum di dalam Indikator Kinerja Utama Badan mempunyai 2 (dua) Sasaran yaitu : Jumlah Pendapatan Pajak Daerah dan IKM Pelayanan Pajak Daerah.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 dilingkup Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, guna mendukung tercapainya target Pembangunan Daerah Kota Bandung yang tertuang dalam Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung 2018-2023.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung merupakan bagian dari rencana aksi dan tindak lanjut dari isu-isu atau permasalahan yang terjadi, yaitu;

1. Kesesuaian regulasi pajak daerah dengan kondisi pelaku usaha di Kota Bandung yang terus berkembang secara dimanis, khususnya untuk Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah;
2. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban untuk membayar pajak dan kurangnya pengetahuan masyarakat/pelaku

usaha di Kota Bandung terkait aturan yang menjadikan mereka sebagai wajib pajak;

3. Belum lancarnya konektivitas sistem yang mendorong akuntabilitas dan transparansi pajak antara wajib pajak dengan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, dalam hal ini berkaitan dengan manajemen sistem informasi pelayanan pajak daerah, khususnya pelayanan yang berbasis Informasi dan Teknologi (IT).
4. Tantangan dalam hal profesionalisme dan integritas SDM Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, untuk meminimalis permasalahan yang dihadapi, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung akan merealisasikan program-program kegiatan yang mendukung perbaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dengan melaksanakan kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah, Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah dan Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah, program-program diatas merupakan nomenklatur Permendagri Nomer 13 Tahun 2006

Adapun rencana program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 sebanyak 8 (delapan) program, 38 (tiga puluh delapan) kegiatan sebagaimana terlampir pada tabel 4.1 dengan perencanaan target pendapatan sebesar Rp. 2.213.000.000.000,- sebagaimana terlampir pada point 3.2.

Sedangkan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 adalah sebanyak 2 (dua) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, 4 (empat) kegiatan yaitu, Administrasi Keuangan, Kegiatan Administrasi Umum, Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur, dan Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, dengan total 27 Sub Kegiatan.

Demikian Rencana Kerja ini disusun, semoga Allah SWT meridhainya sehingga dapat diimplementasikan sebagaimana yang diharapkan.

Bandung, Juni 2020

KEPALA

**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG**



Ir. H. ARIF PRASETYA S, MM.
Pembina Utama Muda
NIP: 19600825 199011 1 001

